



**DISKOMINFO**  
**KAB. CIREBON**

**2023**  
Versi 2

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
2022-2024**

**KATA PENGANTAR**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN CIREBON**

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tahun ini telah membuat dokumen peta rencana yang berisi tentang visi misi dan sasaran SPBE, kondisi actual spbe, target pengembangan spbe dan peta rencana spbe sehingga dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen peta rencana SPBE.

Dengan telah disusunnya Dokumen ini, maka dapat dilihat gambaran peta rencana Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan. Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, pelaksanaan peta rencana yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cirebon ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Dinas Komunukasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sehingga memungkinkan terbitnya dokumen ini. Saran dan kritik untuk perhitungan dan penyajian dokumen ini sangat kami harapkan, dan semoga dokumen ini dapat bermanfaat, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Sumber, 23 Juni 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Cirebon,



**BAMBANG SUDARYANTO, SH., M.H.**

Pembina Tk. I

NIP. 19781024 200701 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
BAB II.....	4
MUATAN PETA RENCANA SPBE KABUPATEN CIREBON .....	4
A. Tata Kelola SPBE.....	4
B. Manajemen SPBE.....	5
C. Layanan SPBE .....	17
D. Aplikasi SPBE .....	25
E. Keamanan.....	27
F. Audit TIK.....	28
BAB III.....	30
TUJUAN DAN SASARAN PETA RENCANA SPBE KABUPATEN CIREBON .....	30
A. RPJMD Kabupaten Cirebon dalam mendukung Pelaksanaan SPBE .....	30
B. Penyelenggaraan Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon .....	31
C. Tujuan dan Sasaran Peta Rencana SPBE .....	33
BAB IV.....	40
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DENGAN MUATAN PETA RENCANA SPBE KABUPATEN CIREBON .....	40
A. Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi.....	40
B. Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	46
C. Layanan Kesehatan Terintegrasi.....	54
D. Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi .....	60
E. Layanan Pendidikan Terintegrasi.....	65
F. Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah .	71
G. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah .....	78
H. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah .....	86
I. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara .....	94
J. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan.....	102

K. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi .....	109
I. Layanan Manajemen Data Statistik .....	116
M. Layanan Manajemen Data Geospasial Pemerintahan .....	123
N. Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah .....	128
O. Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi .....	134
P. Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi.....	140
Q. Layanan Manajemen Data Statistik .....	146
R. Layanan Pendapatan Asli Daerah .....	153
S. Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) .....	158
T. Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) .....	168
BAB V.....	176
PENUTUP.....	176

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai payung hukum yang kuat untuk mempercepat keterpaduan penerapan SPBE di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun nasional. Berbagai aplikasi yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mendukung pelaksanaan layanan digital. Namun aplikasi tersebut cenderung bersifat sektoral serta belum terintegrasi. Inovasi digital yang mendukung terwujudnya layanan digital nasional memerlukan keterpaduan pembangunan dan pengembangan SPBE baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keterpaduan tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang lebih sistematis, sederhana, dan terpadu (terintegrasi). Dimana integrasi mulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Dengan adanya teknologi informasi sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satu evaluasi penerapan e-Government di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era e-Government menuju i-Government (integrated Government).

Selain itu adanya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 sebagai instrument hukum guna mendorong percepatan Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE di Kabupaten Cirebon sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan dilakukannya penyusunan dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi, mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah dan memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem guna menghindari duplikasi data dan ketidaktepatan data.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Cirebon yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk:

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE Framework);
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE Roadmap);
3. Rencana proyek implementasi 2 tahun (SPBE Implementation plan) sesuai dengan sisa masa RPJMD.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- a) Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Cirebon;

- b) Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
- c) Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur SPBE Kabupaten Cirebon;
- d) Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE;
- e) Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

## **BAB II**

### **MUATAN PETA RENCANA SPBE KABUPATEN CIREBON**

Muatan Peta Rencana SPBE disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan RPJMD. Adapun muatan Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon meliputi:

#### **A. Tata Kelola SPBE**

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan tujuan tata kelola SPBE Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon adalah untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:
  - a. Masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.



- b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon adalah:
    - 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
    - 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
    - 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
    - a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
    - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
      - 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
      - 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
      - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

## **B. Manajemen SPBE**

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Lingkup manajemen pada audit aplikasi adalah sesuai amanat perpres SPBE, dimana tujuannya agar aplikasi terkelola dengan baik dan berkelanjutan karena merupakan aplikasi khusus sebuah instansi pusat dan pemerintah daerah dimana aplikasi tersebut merupakan output proses bisnis dari layanan publik

IPPD tersebut, yang sesuai Peraturan Menteri No 59 Tahun 2020 ditetapkan minimal ada 3 buah aplikasi khusus IPPD.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 mengatur tentang pemantauan dan evaluasi SPBE, yang merupakan revisi terhadap Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018. Namun dalam Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tersebut terdapat salah satu perubahan yang cukup signifikan yaitu dengan munculnya domain manajemen SPBE dalam penilaian SPBE, dimana dalam penilaian sebelumnya item tersebut tidak muncul. Penerapan Manajemen SPBE terdiri atas 8 indikator penilaian, yaitu:

### **1. Manajemen Risiko**

Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Proses Manajemen Risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas proses:

- komunikasi dan konsultasi;
- penetapan konteks Risiko SPBE;
- penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi Risiko SPBE;
- penanganan Risiko SPBE;
- pemantauan dan reviu;
- pencatatan dan pelaporan

sedangkan tingkat kematangan penerapan manajemen Risiko SPBE antara lain:

1. Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan. kondisi: kegiatan manajemen risiko spbe diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
2. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan mengacu program kegiatan yang terarah dan terencana. kondisi: penerapan manajemen risiko spbe dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko spbe.
3. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko spbe.
4. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakann strategis manajemen risiko SPBE telah ditetapkan oleh komite manajemen risiko spbe atau tim koordinasi SPBE instansi pusat/pemerintah daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di instansi pusat/pemerintah daerah. selain itu, penerapan manajemen risiko spbe telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

## **2. Manajemen Keamanan Informasi**

Keamanan informasi adalah suatu kondisi untuk melindungi aset yang dimiliki organisasi dari berbagai ancaman pihak internal maupun eksternal untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, serta terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin

keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.

Penerapan Keamanan Informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.

Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan manajemen Keamanan Informasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal. Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Manajemen Keamanan Informasi terdiri atas 5 level antara lain:

1. Level 1

Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia dalam tahap pembangunan dan pemenuhan level baik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sedang membangun pengendalian Keamanan Informasi. Pada level ini Draf/rancangan penerapan Keamanan Informasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi.

2. Level 2  
Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia. Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Pada level ini Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah terdapat pengendalian Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah. Sedangkan untuk bukti dukung hanya berupa Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya hanya dilakukan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah.
3. Level 3  
Pada level ini Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah terdapat pengendalian keamanan informasi yang dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Untuk bukti dukung dilevel 3 bukan hanya konteks pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya sudah dilakukan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah.
4. Level 4  
Terpenuhinya level 3 dan pengendalian keamanan informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan risiko SPBE. Selain itu, pengendalian keamanan informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. Pada level ini pula Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi keamanan informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala. Kriteria bukti dukung level 4 antara lain:

1. Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar keamanan informasi yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal.
  2. Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan strategis keamanan informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
  3. Terdapat dokumen reviu dan evaluasi penerapan Keamanan Informasi, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi penerapan Keamanan Informasi.
5. Level 5
- Pada level ini Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian keamanan informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian keamanan informasi. Instansi pusat/pemerintah daerah melakukan perbaikan penerapan proses pengendalian keamanan informasi sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan. Dokumentasi penerapan keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan keamanan informasi.

### **3. Manajemen Data**

Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Sedangkan data merupakan catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling

berinteraksi. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintergrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.

Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan yaitu:

- a. Arsitektur Data;
- b. Data Induk dan Data Referensi;
- c. Basis Data; dan
- d. Kualitas Data.

#### **4. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Aset TIK mencakup perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, *outsource services*, dan *IT asset register*.

## **5. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE**

Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam SPBE. Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE termasuk didalamnya kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dan promosi literasi SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon:

Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon adalah:

- a) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon; dan
- b) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
  - 1) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan



pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.

- 2) Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
  - a) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
  - b) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

## **6. Manajemen Pengetahuan SPBE**

Manajemen Pengetahuan adalah proses yang dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Tingkat kematangan penerapan manajemen Pengetahuan sebagai berikut:

- a) Level 1 Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan. Eviden: Belum ada penerapan, belum ada perencanaan kegiatan terkait.
- b) Level 2. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Eviden: Adanya renja terkait

manajemen perubahan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan. (integral dalam tim koordinasi SPBE).

- c) Level 3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan. Data dukung : • Adanya pedoman formal mengenai manajemen pengetahuan. • Adanya aplikasi manajemen pengetahuan yang digunakan (manual/screenshot/ video/demo).
- d) Level 4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE. Data dukung: • Adanya aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi, • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan penerapan/aplikasi manajemen pengetahuan.
- e) Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE. Data dukung: Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya).

## **7. Manajemen Perubahan SPBE**

Manajemen Perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Lingkup Manajemen Perubahan SPBE antara lain:

1. Perubahan Aplikasi;
2. Perubahan Perangkat Keras;
3. Perubahan Perangkat Lunak;
4. Perubahan Infrastruktur;
5. Perubahan Proses Bisnis;
6. Perubahan Lingkungan Organisasi;
7. Perubahan Layanan;
8. Perubahan Data;
9. Perubahan Keamanan;
10. Perubahan Arsitektur.

Tingkat kematangan penerapan manajemen Perubahan yaitu:

- a) level 1. Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan. Belum ada kegiatan, atau kegiatan diselenggarakan secara adhoc
- b) Level 2. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-masing. Data dukung: Adanya renja terkait manajemen perubahan, rencana perubahan/upgrade.
- c) Level 3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman perubahan. data dukung: Adanya prosedur formal yang mencakup proses umum, manajemen perubahan SPBE pada semua unit kerja.
- d) Level 4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reuiu dan evaluasi. Data dukung: Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen perubahan
- e) Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reuiu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE. Data dukung: Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan.

## **8. Manajemen Layanan SPBE**

Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas. Manajemen Layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif. Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:

1. pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
2. pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
3. pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.

Tingkat kematangan penerapan manajemen Layanan SPBE antar lain:

- a) Level 1 Belum ada kegiatan, atau kegiatan diselenggarakan secara adhoc.
- b) Level 2, Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE). Data dukung: Adanya renja terkait manajemen layanan SPBE dan output kegiatan.
- c) Level 3, Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada semua proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE). Data dukung: Adanya prosedur formal manajemen layanan yang mencakup Semua proses manajemen layanan.

- d) Level 4, Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan revidu dan evaluasi. Data dukung: Adanya aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video), • Notulensi rapat/laporan evaluasi manajemen layanan.
- e) Level 5, Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil revidu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE. Data dukung: Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya).

### **C. Layanan SPBE**

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE Kabupaten Cirebon di dalam aspek layanan SPBE memiliki level rintisan, yang berarti pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah secara proses layanan dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi. Sudah ada regulasi namun belum mencakup permintaan data yang diinginkan oleh SPBE.

Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 telah melakukan layanan SPBE baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik.

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

#### **a. Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik**

Untuk penggunaan perencanaan berbasis elektronik Pemerintah Daerah saat ini sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Selain itu untuk *Back Up* penginputan data perencanaan,

Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan sistem local e-perencanaan sehingga alur penginputan dapat terdokumentasikan.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis system dan hasil produk yang dihasilkan.

b. Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik

Untuk penggunaan penganggaran berbasis elektronik Pemerintah Daerah saat ini sudah terintegrasi dengan system informasi pemerintah daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Selain itu untuk back up penginputan data penganggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan sistem lokal e-penganggaran sehingga alur penginputan dapat terdokumentasikan.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan.

c. Layanan Keuangan Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan layanan keuangan khususnya penatausahaan Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Cirebon (SIKATON) yang sudah terintegrasi dengan e-perencanaan dan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIM BD) Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis system dan hasil produk yang dihasilkan

d. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon system informasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIM PBJ) dan sistem LPSE yang sudah terintegrasi dengan LKPP, sehingga dari tahap perencanaan sampai dngan pelaporan sudah dapat dipantau oleh LKPP.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

e. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan layanan kepegawaian di Kabupaten Cirebon sudah terfasilitasi melalui sistem informasi kepegawaian yang terdapat data data pegawai serta sistem tersebut sudah diintegrasikan dengan sistem perencanaan dan penganggaran serta penilai kinerja.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

f. Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan layanan kearsipan di Kabupaten Cirebon sudah difasilitasi 2 (dua) sistem yaitu sistem kearsipan dinamis melalui Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan sistem kearsipan lokal melalui SIKD.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan.

g. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan layanan barang milik negara di Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan sistem barang milik daerah yang berfungsi sebagai data dasar seluruh barang negara, selain itu sistem ini sudah terintegrasi dengan sistem layanan keuangan daerah dan layanan kinerja pegawai.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

h. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan pengawasan internal pemerintah saat ini masih menggunakan sistem lapor.go.id, sehingga masukan dari masyarakat baik pengaduan kinerja maupun *whistleblowing* terfasilitasi dalam 1 (satu) system.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

i. Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah

Untuk pelaksanaan pengukuran kinerja instansi terdapat beberapa system untuk penilaian pemerintah menggunakan sistem

LAKIP dan LKPJ sedangkan penilaian organisasi menggunakan sistem SIMONEK,

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan

j. Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik

Untuk pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai pemerintah kabupaten Cirebon menggunakan sistem e-kinerja dimana dari jenjang staf hingga sekretaris daerah harus melakukan penginputan kinerja dan juga sistem ini sudah diintegrasikan dengan sistem simonek, sehingga kinerja yang dihasilkan akan berdampak terhadap penghasilan TPP bagi masing-masing pegawai.

Dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang layanan tersebut adalah regulasi dari pimpinan daerah, user manual, proses bisnis sistem dan hasil produk yang dihasilkan. Dan untuk manajemen SPBE untuk penilaian yang terdiri dari 2 sub kategori yaitu:

I. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek ini yang telah dipenuhi oleh Pemkab Cirebon adalah Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah.

- Kekuatan

Pada aspek ini dapat terlihat bahwa Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pemerintah Kabupaten Cirebon.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Cirebon masih belum optimal menerapkan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana dalam data dukung yang disampaikan tidak dijumpai substansi yang memenuhi persyaratan indikator.

Adapun layanan administrasi pemerintahan yaitu:

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (e-Perencanaan)



2. Layanan Keuangan (SIKATON)
3. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE)
4. Layanan Kepegawaian (SIMPEG)
5. Layanan Kearsipan Dinamis (SRIKANDI & SIKD)
6. Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIP-BMD)
7. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (e-SAKIP & SIMONEK)
8. Layanan Kinerja Pegawai (e-KINERJA, MPRASS & SIPEKA)

## II. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek ini yang telah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Cirebon namun masih belum optimal menerapkan Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan SIMPAD, dan Layanan Perizinan Online dimana dalam data dukung yang disampaikan tidak dijumpai substansi yang memenuhi persyaratan indikator.

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

- a. Portal Layanan Publik Terintegrasi
  - 1) Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
  - 2) Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Cirebon yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon;
  - 3) Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari faktor strategi atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan,

sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;

- 4) Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE;
- 5) Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *IoT (Internet of Things)*;
- 6) Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

sedangkan untuk layanan publik antara lain :

1. Layanan Pengaduan (SP4N LAPOR)
  2. Layanan Data Terbuka (OPEN DATA)
  3. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
  4. Layanan Pajak Daerah (Akangsurja)
  5. Layanan Perijinan (OSS & Perijinan Online)
  6. Layanan Kependudukan (SIK & SINTREN)
  7. Layanan Sosial (SIPEPEK)
  8. Layanan Kesehatan (Call Center 119 & SIRUDAL)
  9. Layanan Keamanan (SIKONDA)
  10. Layanan Persampahan (SEBANGSAKABEH)
  11. Layanan Retribusi Pasar (SMART MARKET)
  12. Layanan Pemadam Kebakaran (SIWASPROKAR)
- b. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
- 1) Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sangat memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;
  - 2) Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan,

pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;

- 3) Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;
- 4) Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
- 5) Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan aplikasi umum berbagi pakai.

c. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- 1) Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi
- 2) Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE
- 3) Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT
- 4) Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

- d. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
  - 1) Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi memberikan layanan yang dapat dibagi pakaikan kenada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
  - 2) Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia
  - 3) Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
    - a) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
    - b) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.
- e. Pembangunan Portal Data Daerah
  - 1) Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi nemerintah. pelaku usaha. dan masvarakat:
  - 2) Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;

Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

#### **D. Aplikasi SPBE**

Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Aplikasi SPBE terdiri atas: a. Aplikasi Umum; Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum. b. Aplikasi Khusus. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

#### **E. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi**

- a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
  - 1) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah;

- 2) Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:
  - a) mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non pemerintah;
  - b) terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon;
  - c) terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
  - d) menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
- 3) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- 4) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
  - a) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal;
  - b) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE; dan
  - c) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai.
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi- pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan SPBE dan memudahkan integrasi umum proses bisnis pemerintahan. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
- c. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
  - 1) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku

usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

- 2) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
- 3) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
  - a) menerapkan manajemen data yang terpadu;
  - b) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu:  
dan
  - c) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

#### **F. Keamanan SPBE**

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. 4. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas meliputi kajian tentang pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE beserta proses audit yang sistematis untuk menjamin kerahasiaan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi. Penerapan Keamanan Informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE. Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

#### **G. Audit TIK**

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Penerapan Audit TIK, antara lain:

##### **a. Audit Infrastruktur SPBE.**

Merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Data dukung antara lain berupa pedoman audit infrastruktur. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Keamanan SPBE Data dukung berupa pedoman audit keamanan informasi. Akan tetapi Pemkab Cirebon telah membentuk Tim Audit Internal TIK SPBE dan telah diimplementasikan pada tahun 2022 dan Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah memiliki indikator yang meraih pemenuhan aspek ini.

Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan



informatika dan BRIN terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

b. Audit Aplikasi SPBE.

proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Data dukung berupa pedoman audit aplikasi. Audit Aplikasi Khusus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan BRIN terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus. Akan tetapi Pemkab Cirebon telah membentuk Tim Audit Internal TIK SPBE dan telah diimplementasikan pada tahun 2022 dan Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah memiliki indikator yang meraih pemenuhan aspek ini.

c. Audit Keamanan SPBE.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Keamanan SPBE Data dukung berupa pedoman audit keamanan informasi. Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki indikator yang meraih pemenuhan aspek ini. Akan tetapi Pemkab Cirebon telah membentuk Tim Audit Internal TIK SPBE dan menganggarkan untuk kegiatan ISO 27001 pada tahun 2024. Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan BSSN terkait pemantallan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PETA RENCANA SPBE KABUPATEN CIREBON**

### **A. RPJMD Kabupaten Cirebon dalam mendukung Pelaksanaan SPBE**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta kabupaten/kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005-2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih.

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025.

Kurun waktu tahun 2019-2024 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025. Maka pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kabupaten Cirebon dalam segala bidang terus ditingkatkan. Dalam tahap ini akan dilaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.

Oleh karena, itu visi dan misi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 pun mengacu pada hal tersebut. Adapun visi Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai cerminan visi dari Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih periode 2019-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”**

Dalam Visi Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 tersebut, ada 5 (lima) kata kunci, yakni Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.

## B. Penyelenggaraan Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon

Tujuan dimaksudkan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran dimaksudkan sebagai rumusan kondisi yang akan dicapai dimasa depan yang dirumuskan secara jelas, menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon, selain memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah terpilih juga didukung dan berkolerasi dengan isu-isu strategis di Kabupaten Cirebon. Kelima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 16 (Enam Belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak/*impact*.

**Misi Pertama**, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

Tujuan 1: Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon

Sasaran:

1. Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon.

**Misi Kedua**, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas

Sasaran:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

### Tujuan 3: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

#### Sasaran:

1. Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial;
2. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja.

**Misi Ketiga**, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

### Tujuan 4: Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama

#### Sasaran:

1. Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama.

**Misi Keempat**, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

### Tujuan 5: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### Sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
3. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

### Tujuan 6: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa

#### Sasaran:

1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih;
3. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik;
4. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

**Misi Kelima**, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Tujuan 7: Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban;
2. Menurunnya resiko bencana.

7 (tujuh) tujuan pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 ini selaras dengan 16 (enam belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global atau yang dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, telah diintegrasikan dengan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui perumusan dokumen perencanaan untuk mengentaskan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain hal tersebut, pembangunan Kabupaten Cirebon juga menunjukkan eksistensi dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substansial. Dalam melihat kesinambungan antara tujuan RPJMD Kabupaten Cirebon dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

### **C. Tujuan dan Sasaran Peta Rencana SPBE**

Sebagai upaya upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-4 yaitu Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, maka dalam RPJMD Tahun 2019-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Peta Rencana Kabupaten Cirebon yaitu salah satu indikatornya Indeks SPBE.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon disusun bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon disusun

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon berpedoman pada Peta Reencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon, RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Review. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

- a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
- b. Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- d. Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;  
atau
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Adapun alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE meliputi proses sebagai berikut:

1. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan RPJMD dan Dokumen Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Penentuan Program dan Kegiatan.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon tertuang juga dalam Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang beberapa kali telah diubah terakhir tahun 2023 yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah turunan atau uraian dari Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masuk dalam misi Keempat Tujuan keenam yaitu Terselenggaranya tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa dengan Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik.

Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan penyesuaian Tujuan dan Sasaran serta target-target tujuan dan sasaran pembangunan mulai Tahun 2021 sampai dengan 2024. Penyajian Tujuan dan Sasaran serta target-target tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

**VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2020	Target				Kondisi Akhir	
						2021	2022	2023	2024		
<b>Misi 1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat</b>											
1.	Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan	Persen	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00	
	1.	Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok	255	232	257	258	259	260	260
<b>Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi</b>											
2.	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,69	68,75	69,93	69,92	70,53	71,15	71,15	
	2.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah(RLS)	Tahun	6,71	6,92	7,05	7,18	7,31	7,44	7,44
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,24	12,25	12,34	12,44	12,53	12,63	12,63
	3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,82	71,99	72,11	72,24	72,36	72,48	72,48
3.	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Persen	9,94	11,24	11,14	11,04	10,94	10,84	10,84	
		Tingkat pengangguran terbuka	Prosen	10,28	11,52	11,12	10,70	10,30	9,90	9,90	
		PDRB Per Kapita	Juta Rp	22,41	22,43	23,25	24,95	26,78	28,74	28,74	



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2020	Target				Kondisi Akhir
4.	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	Persen	67,06	n.a.	70,17	70,94	71,72	72,50	72,50
5.	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	Persen	58,66	56,44	57,22	58,03	58,83	59,64	59,64
<b>Misi 3: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budipekerti, santun, dan beretika</b>										
4.	Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00
6.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama	Persen		78	80	81	82	83	83
<b>Misi 4: Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>										
5.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Prosen	4,68	-1,08	4,38	4,61	4,84	5,08	5,08
		Indeks Gini	Poin	0,344	0,338	0,336	0,334	0,332	0,330	0,330
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Kapita /Tahun	10.670	10.342	10.606	10.891	11.198	11.529	11.529
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Prosen	-1,05	1,76	1,86	2,08	2,31	2,54	2,54

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2020	Target				Kondisi Akhir
		Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Prosen	2,82	-0,42	3,08	3,74	4,41	5,07	5,07
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Prosen	4,62	-7,03	5	5,25	5,5	5,75	5,75
		Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Prosen	5,47	-9,50	4,33	4,63	4,93	5,23	5,23
	8.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Poin	91,50	93	93,10	93,20	93,30	93,40	93,40
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	71,17	71,44	71,71	71,98	72,25	72,52	72,52
	9.	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Poin	77,99	79,89	79,46	80,20	80,93	81,67	81,67
	4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Poin	52,51	52,29	52,67	52,76	52,84	52,92	52,92
	6.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa	Indeks	50,58	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
	1.	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Poin	3,25	3,27	3,65	3,85	3,95	4,00	4,00
		Indeks kemandirian fiskal daerah	Prosen	15,71	16,24	16,79	17,36	17,95	18,56	18,56

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2020	Target				Kondisi Akhir
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Poin	68,00	70,00	73,00	76,00	79,00	80,00	80,00
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	Poin	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
3.	Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin	2,63	2,78	2,93	3,00	3,10	3,20	3,20
4.	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah desa mandiri	Desa	2	5	28	49	70	91	91
<b>Misi 5: Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional</b>										
7.	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	Persen	n.a	53,05	56,09	64,12	70,59	77,50	77,50
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Jumlah pelanggaran Perda	Kasus	n.a	403	398	393	338	383	403
2.	Menurunnya resiko bencana	Indek resiko bencana	Poin	165,44	n.a	154,72	149,36	144,00	138,64	138,64

Sumber: Hasil proyeksi, diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

**BAB IV**  
**INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE DENGAN**  
**MUATAN PETA RENCANA SPBE KABUPATEN CIREBON**

Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 2019 – 2024 dengan tematik layanan digital. Untuk Sasaran Program/Kegiatan bersumber dari Dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon untuk periode 2019 – 2024 yang dapat didukung dari realisasi Arsitektur SPBE melalui Inisiatif Strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE. Dokumen strategis yang diacu adalah RPJMD Kabupaten Cirebon untuk periode 2019 – 2024.

Penentuan ini mencakup Indikator serta Target yang telah direncanakan pada Dokumen Strategis. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada dokumen strategis yang ditetapkan. Inisiatif Strategis Kabupaten Cirebon terdapat 20 (dua puluh) muatan dan memiliki 7 (tujuh) muatan Peta Rencana SPBE. Sehingga, jika pada dokumen ini terdapat lebih dari 1 (satu) inisiatif strategis, maka terdapat muatan sejumlah inisiatif strategis dikali dengan 7 (tujuh) muatan peta rencana SPBE.

**A. Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi**

No	Project/Activites	UIC	Baseline	Target		
			2022	2023	2024	
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>						
Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi			4,84	5,08	
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi</b>						
1	<b>Tata Kelola</b>					
	A	Kebijakan Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik				
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	DMPTPSP dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan	DMPTPSP dan Tim	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	Koordinasi SPBE			
		Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP - Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	DMPTSP dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik				
		Peningkatan Mutu Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik -	DPMPTSP	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik				
		Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik -	DPMPTSP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Perizinan Berusaha dan	Inspektorat dan DMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Akreditasi Terintegrasi				
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi	Diskominfo dan DMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi	Diskominfo dan DMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi	BKAD dan DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi	BKPSDM dan DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi	BKPSDM dan DMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi	Bagian Organisasi dan DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Perizinan				

		Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi	Diskominfo dan DMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>3</b>	<b>Layanan</b>					
	A	Penerapan Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik terintegrasi	DPMPTSP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	DPMPTSP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	DPMPTSP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
<b>4</b>	<b>Aplikasi</b>					
	A	Penerapan Aplikasi Perizinan Usaha dan Investasi				



		Bebasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi OSS dan Perijinan Online	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi OSS dan Perijinan Online	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
<b>5</b>	<b>Infrastruktur</b>					
	A	Infrastruktur Pendukung Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>6</b>	<b>Keamanan</b>					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Infrastruktur untuk Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Perizinan Usaha dan Investasi Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Perijinan Online	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Perijinan Online	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Perijinan Online	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

**B. Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

No	Project/Activites	UIC	Baseline			Target		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah								
Indikator	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)			80,93			81,67	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
1	Tata Kelola							
	A	Kebijakan Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum						

		dan Perumahan Rakyat				
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUTR, DPKPP dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUTR, DPKPP dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUTR, DPKPP dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
		- Peningkatan Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUTR dan DPKPP	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
		- Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Monitoring	DPUTR dan DPKPP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

		Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Inspektorat , DPUTR dan DPKPP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diskominfo , DPUTR dan DPKPP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
		- Pedoman dan Dokumen	Diskominfo , DPUTR	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	dan DPKPP			
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BKAD, DPUTR dan DPKPP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BKPSDM, DPUTR dan DPKPP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Monitoring Pembangunan				

		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BKPSDM, DPUTR dan DPKPP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bagian Organisasi, DPUTR dan DPKPP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diskominfo, DPUTR dan DPKPP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Layanan				

		Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik terintegrasi	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
		- Survey Kepuasan Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan				

		Rakyat Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bebas Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bebas Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bebas Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bebas Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bebas Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket



		Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Keamanan					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik				
		Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

7 Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Elektronik	DPUTR, DPKPP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

### C. Layanan Kesehatan Terintegrasi

No	Project/Activites	UIC	Baseline			Target		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</b>								
Indikator	Umur Harapan Hidup (UHH)				72,36	72,48		
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Kesehatan Terintegrasi</b>								
<b>1 Tata Kelola</b>								
	A	Kebijakan Layanan Kesehatan Terintegrasi Berbasis Elektronik						
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Kesehatan Terintegrasi Berbasis	Dinkes dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan		

		Elektronik				
		- Penyusunan SOP Layanan Kesehatan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Dinkes dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Kesehatan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Dinkes dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Terintegrasi Berbasis Elektronik				
		- Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Dinkes	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Terintegrasi Berbasis Elektronik				
		- Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Dinkes	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Kesehatan Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Kesehatan	Inspektorat dan Dinkes	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Terintegrasi				
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Kesehatan Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Kesehatan Terintegrasi	Diskominfo dan Dinkes	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Kesehatan Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Kesehatan Terintegrasi	Diskominfo dan Dinkes	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Kesehatan Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Kesehatan Terintegrasi	BKAD dan Dinkes	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Kesehatan Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Kesehatan	BKPSDM dan Dinkes	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Terintegrasi				
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Kesehatan Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Kesehatan Terintegrasi	BKPSDM dan Dinkes	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Kesehatan Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Kesehatan Terintegrasi	Bagian Organisasi dan Dinkes	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Kesehatan Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Kesehatan Terintegrasi	Diskominfo dan Dinkes	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Layanan Kesehatan Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Kesehatan Terintegrasi Bebas Elektronik	Dinkes dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi	Dinkes	1 Kegiatan	1	1

		Layanan Kesehatan Terintegrasi Bebas Elektronik terintegrasi			Kegiatan	Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Kesehatan Terintegrasi Bebas Elektronik	Dinkes	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Kesehatan Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Kesehatan Terintegrasi Bebas Elektronik	Dinkes	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Kesehatan Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi Kesehatan Terintegrasi Online	Dinkes dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Kesehatan Terintegrasi Bebas Elektronik	Dinkes dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Kesehatan Terintegrasi Online	Dinkes dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Kesehatan Terintegrasi Bebas Elektronik				

		- Pengembangan Pusat Data Layanan Kesehatan Terintegrasi Bebas Basis Elektronik	Dinkes dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Kesehatan Terintegrasi Bebas Basis Elektronik	Dinkes dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Kesehatan Terintegrasi Bebas Basis Elektronik	Dinkes dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>6</b>	<b>Keamanan</b>					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Kesehatan Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Kesehatan Terintegrasi Bebas Basis Elektronik	Dinkes dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Kesehatan Terintegrasi Bebas Basis Elektronik	Dinkes dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Kesehatan	Dinkes dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Terintegrasi Bebasis Elektronik				
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Kesehatan Terintegrasi Bebasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Kesehatan Terintegrasi Online	Dinkes dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Kesehatan Terintegrasi Online	Dinkes dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Kesehatan Terintegrasi Online	Dinkes dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

#### D. Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi

No	Project/Activites	UIC	Baseline	Target		
			2022	2023	2024	
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Menurunnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengalami disfungsi Sosial</b>						
Indikator	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kab. Cirebon			71,72	72,50	
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi</b>						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik				
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik	Dinsos dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik	Dinsos dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Sosialisasi dan dan Bimibingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi	Dinsos dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan



		Bebasis Elektronik				
	B	Penyelenggaraan Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik				
		- Peningkatan Mutu Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik	Dinsos	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik				
		- Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik	Dinsos	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
<b>2</b>	<b>Manajemen</b>					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi	Inspektorat dan Dinsos	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi	Diskominfo dan Dinsos	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen	Diskominfo dan Dinsos	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Keamanan Informasi pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi				
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi	BKAD dan Dinsos	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi	BKPSDM dan Dinsos	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi	BKPSDM dan Dinsos	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi	Bagian Organisasi dan Dinsos	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi				

		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi	Diskominfo dan Dinsos	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>3 Layanan</b>						
	A	Penerapan Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebas Basis Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebas Basis Elektronik	Dinsos dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebas Basis Elektronik terintegrasi	Dinsos	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebas Basis Elektronik	Dinsos	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebas Basis Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebas Basis Elektronik	Dinsos	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
<b>4 Aplikasi</b>						
	A	Penerapan Aplikasi Bantuan Sosial Terintegrasi Bebas Basis Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi Bantuan Sosial Terintegrasi Online	Dinsos dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Bantuan Sosial Terintegrasi Bebas Basis Elektronik	Dinsos dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Bantuan Sosial Terintegrasi Online	Dinsos dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
<b>5 Infrastruktur</b>						
	A	Infrastruktur Pendukung Bantuan Sosial Terintegrasi				

		Bebasis Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik	Dinsos dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik	Dinsos dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik	Dinsos dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>6</b>	<b>Keamanan</b>					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik	Dinsos dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik	Dinsos dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik	Dinsos dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>7</b>	<b>Audit TIK</b>					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Bebasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit	Dinsos dan	1 Kegiatan	1	1

		Aplikasi Bantuan Sosial Terintegrasi Online	Diskominfo		Kegiatan	Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Bantuan Sosial Terintegrasi Online	Dinsos dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Bantuan Sosial Terintegrasi Online	Dinsos dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

### E. Layanan Pendidikan Terintegrasi

No	Project/Activites	UIC	Baseline	Target		
			2022	2023	2024	
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat</b>						
Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (RS)			7,31	7,44	
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Pendidikan Terintegrasi</b>						
1	<b>Tata Kelola</b>					
	A	Kebijakan Layanan Pendidikan Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Pendidikan Terintegrasi Bebas Elektronik	Disdik dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan Pendidikan Terintegrasi Bebas Elektronik	Disdik dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Pendidikan Terintegrasi Bebas Elektronik	Disdik dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Peningkatan Mutu Layanan	Disdik	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Bantuan Sosial Terintegrasi Bebas Elektronik				
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Terintegrasi Bebas Elektronik	Disdik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Pendidikan Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Pendidikan Terintegrasi	Inspektorat dan Disdik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Pendidikan Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Pendidikan Terintegrasi	Diskominfo dan Disdik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Pendidikan Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen	Diskominfo dan Disdik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Pendidikan Terintegrasi				
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Pendidikan Terintegrasi				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset - TIK pada Layanan Pendidikan Terintegrasi	BKAD dan Disdik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Pendidikan Terintegrasi				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Pendidikan Terintegrasi	BKPSDM dan Disdik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Pendidikan Terintegrasi				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Pendidikan Terintegrasi	BKPSDM dan Disdik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Pendidikan Terintegrasi				
		Pedoman dan Dokumen	Bagian Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Manajemen Perubahan pada Layanan Pendidikan Terintegrasi	dan Disdik			
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Pendidikan Terintegrasi				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen - Layanan pada Layanan Pendidikan Terintegrasi	Diskominfo dan Disdik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Layanan Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik				
		Pelaksanaan Integrasi Layanan Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Disdik dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Implementasi Layanan Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik terintegrasi	Disdik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Sosialisasi Layanan Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Disdik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik				
		Survey Kepuasan Layanan Pendidikan Terintegrasi Berbasis	Disdik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan



		Elektronik				
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi Pendidikan Terintegrasi Online	Disdik dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Disdik dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Pendidikan Terintegrasi Online	Disdik dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Disdik dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Disdik dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Disdik dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Keamanan					

	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Disdik dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Disdik dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik	Disdik dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Pendidikan Terintegrasi Berbasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Pendidikan Terintegrasi Online	Disdik dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Pendidikan Terintegrasi Online	Disdik dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Pendidikan Terintegrasi Online	Disdik dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

**F. Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah**

No	Project/Activites	UIC	Baseline	Target		
			2022	2023	2024	
Sasaran Program/Kegiatan Strategis: Meningkatkan Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik						
Indikator	Indeks SPBE			3,10	3,20	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Elektronik				
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Elektronik				
		- Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi				

		Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik				
		Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan - Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik	Bappelitbangda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah - Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah	Inspektorat dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah - Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah	Diskominfo dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Administrasi Pemerintahan di				

		Pemerintah Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah	Diskominfo dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah	BKAD dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah	BKPSDM dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen	BKPSDM dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Terintegrasi	Bappelitbangda			
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada - Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada - Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah	Diskominfo dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik				
		Pelaksanaan Integrasi Layanan - Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Berbasis	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Elektronik				
		- Implementasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Basis Elektronik terintegrasi	Bappelitbangda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Basis Elektronik	Bappelitbangda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Basis Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Basis Elektronik	Bappelitbangda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Basis Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Basis Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Administrasi Pemerintahan di	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

		Pemerintah Daerah Online				
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Keamanan					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Bebas	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket



		Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

## G. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah

No	Project/Activites	UIC	Baseline	Target		
			2022	2023	2024	
Sasaran Program/Kegiatan Strategis: Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik						
Indikator	Indeks SPBE			3,10	3,20	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik				
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik				
		- Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang	BKAD	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Keuangan Daerah Bebas Elektronik				
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik				
		Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah	Inspektorat dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada	Diskominfo dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah				
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah	Diskominfo dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah	BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya	BKPSDM dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah				
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah	BKPSDM dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah	Bagian Organisasi dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen	Diskominfo dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Layanan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah				
3	Layanan					
	A	Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Basis Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Basis Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Basis Elektronik terintegrasi	BKAD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Basis Elektronik	BKAD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Basis Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Administrasi Pemerintahan di	BKAD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

		Bidang Keuangan Daerah Bebas Basis Elektronik				
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Basis Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Basis Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Basis Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Basis Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Keamanan					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan di	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket



		Bidang Keuangan Daerah Berbasis Elektronik				
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Berbasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

**H. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Project/Activites	UIC	Baseline	Target			
			2022	2023	2024		
Sasaran Program/Kegiatan Strategis: Meningkatkan Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik							
Indikator	Indeks SPBE			3,10	3,20		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
1	Tata Kelola						
	A	Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik					
		-	Penyusunan Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		-	Penyusunan SOP Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		-	Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik					

		- Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik	Bappelitbangda	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik				
		- Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik	Bappelitbangda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Inspektorat dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen				

		Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Diskominfo dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Diskominfo dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset	Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BKPSDM dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BKPSDM dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada				

		Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan - Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bagian Organisasi dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan - Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Diskominfo dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik				
		Pelaksanaan Integrasi - Layanan Administrasi Pemerintahan di	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik				
		- Implementasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik terintegrasi	Bappelitbangda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik	Bappelitbangda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik	Bappelitbangda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik				

		- Pelaksanaan Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket



		Daerah Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Keamanan					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Administrasi	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik				
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

### I. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara

No	Project/Activites	UIC	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
Sasaran Program/Kegiatan Strategis: Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik					
Indikator	Indeks SPBE			3,10	3,20
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara					
1	Tata Kelola				

	A	Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik					
		-	Penyusunan Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		-	Penyusunan SOP Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		-	Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik					
		-	Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik					
		-	Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan	Bagian Organisasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

		Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Berbasis Elektronik				
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada - Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara	Inspektorat dan Bagian Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada - Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara	Diskominfo dan Bagian Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada	Diskominfo dan Bagian Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara				
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara	Bagian Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara	BKPSDM dan Bagian Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi	BKPSDM dan Bagian Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara				
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada - Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara	Bagian Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada - Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara	Diskominfo dan Bagian Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik				
		Pelaksanaan Integrasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		- Implementasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik terintegrasi	Bagian Organisasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Online	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Administrasi	Bagian Organisasi dan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

		Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Online	Diskominfo			
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Keamanan					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket



		Negara Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Online	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Online	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara Online	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

**J. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan**

No	Project/Activites	UIC	Baseline			Target		
			2022	2023	2024	2023	2024	
Sasaran Program/Kegiatan Strategis: Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik								
Indikator	Indeks SPBE					3,10	3,20	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan								
1	Tata Kelola							
	A	Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik						
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik	Bappelitbangda, Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan		
		- Penyusunan SOP Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik	Bappelitbangda, Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
		- Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik	Bappelitbangda, Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
	B	Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik						
		- Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket		

		Pemerintahan Bebasis Elektronik				
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebasis Elektronik				
		Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebasis Elektronik	Bappelitba ngda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan	Inspektorat , Bappelitba ngda dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan	Bappelitba ngda dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan				
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di	BKPSDM, Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Bidang Informasi Pemerintahan				
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan	BKPSDM, Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

3 Layanan						
	A	Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik terintegrasi	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4 Aplikasi						
	A	Penerapan Aplikasi Administrasi				

		Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Basis Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Keamanan					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Basis Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Basis Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Basis Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Bebas Basis Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket



7 Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

#### K. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi

No	Project/Activites	UIC	Baseline			Target		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sasaran Program/Kegiatan Strategis: Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik								
Indikator	Indeks SPBE			3,10	3,20			
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi								
1 Tata Kelola								
	A	Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Berbasis Elektronik						
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi	Bappelitbangda dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan		

			Bebasis Elektronik				
		-	Penyusunan SOP Layanan Administrasi Pemerintahan di di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Basis Elektronik	Bappelitbangda, Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		-	Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Basis Elektronik	Bappelitbangda, Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B		Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Basis Elektronik				
		-	Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Basis Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Basis Elektronik				
		-	Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Basis Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen						
	A		Penerapan Manajemen Risiko				

		pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada - Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi	Inspektorat dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada - Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi	Diskominfo dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada - Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi	Diskominfo dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi				

		Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi</li> </ul>	BKAD dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi</li> </ul>	BKPSDM dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi</li> </ul>	BKPSDM dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di				

		Bidang Riset dan Inovasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi	Bagian Organisasi dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi	Diskominfo dan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Elektronik terintegrasi	Bappelitbangda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan	Bappelitbangda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

		Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Berbasis Elektronik				
	B	Survey Penggunaan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Berbasis Elektronik				
		Survey Kepuasan Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Berbasis Elektronik	Bappelitbangda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Berbasis Elektronik				
		Pelaksanaan Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Pengembangan Sistem Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Berbasis Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Berbasis				

		Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>6</b>	<b>Keamanan</b>					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Inovasi Bebas Elektronik				
		Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Elektronik	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Bebas Elektronik				
		Pelaksanaan Audit Aplikasi Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Pelaksanaan Audit Infrastruktur Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Pelaksanaan Audit Keamanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi Online	Bappelitbangda dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

#### L. Layanan Manajemen Data Statistik

No	Project/Activites	UIC	Baseline			Target		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sasaran Program/Kegiatan Strategis: Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik								
Indikator	Indeks SPBE			3,10		3,20		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Manajemen Data Statistik								
1	Tata Kelola							
	A	Kebijakan Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik						



		- Penyusunan Kebijakan Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik	Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik	Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik	Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik				
		- Peningkatan Mutu Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik				
		- Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Manajemen Data Statistik				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan	Inspektorat dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Manajemen Data Statistik				
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Manajemen Data Statistik				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Manajemen Data Statistik	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Manajemen Data Statistik				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Manajemen Data Statistik	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Manajemen Data Statistik				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Manajemen Data Statistik	BKAD dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Manajemen Data Statistik				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada	BKPSDM dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Layanan Manajemen Data Statistik				
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Manajemen Data Statistik				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen - Pengetahuan pada Layanan Manajemen Data Statistik	BKPSDM dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Manajemen Data Statistik				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen - Perubahan pada Layanan Manajemen Data Statistik	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Manajemen Data Statistik				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen - Layanan pada Layanan Manajemen Data Statistik	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>3</b>	<b>Layanan</b>					
	A	Penerapan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik				
		Pelaksanaan Integrasi Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Manajemen Data	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

		Statistik Bebas Elektronik terintegrasi				
		Sosialisasi Layanan - Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik				
		Survey Kepuasan Layanan - Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik				
		Pelaksanaan Aplikasi OSS dan Manajemen Data Statistik Online -	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Pengembangan Sistem - Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Monitoring dan Evaluasi Aplikasi - OSS dan Manajemen Data Statistik Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik				
		Pengembangan Pusat Data Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik -	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah -	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik				
		Pengembangan Sistem Penghubung Layanan - Pemerintah Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>6</b>	<b>Keamanan</b>					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik				
		Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik -	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik -	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik -	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>7</b>	<b>Audit TIK</b>					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Manajemen Data Statistik Bebas Elektronik				
		Pelaksanaan Audit Aplikasi Manajemen Data Statistik Online -	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan	Diskominfo	1 Kegiatan	1	1

		Audit Infrastruktur Manajemen Data Statistik Online			Kegiatan	Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Manajemen Data Statistik Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

### M. Layanan Manajemen Data Geospasial

No	Project/Activites	UIC	Baseline			Target		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sasaran Program/Kegiatan Strategis: Meningkatkan Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik								
Indikator	Indeks SPBE				3,10	3,20		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Manajemen Data Geospasial								
1	Tata Kelola							
	A	Kebijakan Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik						
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo , PUTR dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo , PUTR dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Sosialisasi dan dan Bimibingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo , PUTR dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik						
		- Peningkatan Mutu Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas	Diskominfo dan PUTR	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Elektronik				
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik				
		- Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo dan PUTR	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Manajemen Data Geospasial				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Manajemen Data Geospasial	Inspektorat, Diskominfo dan PUTR	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Manajemen Data Geospasial				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Manajemen Data Geospasial	Diskominfo dan PUTR	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Manajemen Data Geospasial				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada	Diskominfo dan PUTR	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Layanan Manajemen Data Geospasial				
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Manajemen Data Geospasial				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Manajemen Data Geospasial	BKAD, Diskominfo dan PUTR	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Manajemen Data Geospasial				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Manajemen Data Geospasial	BKPSDM, Diskominfo dan PUTR	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Manajemen Data Geospasial				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Manajemen Data Geospasial	BKPSDM, Diskominfo dan PUTR	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Manajemen Data Geospasial				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan	Bagian Organisasi, Diskominfo dan PUTR	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



		Manajemen Data Geospasial				
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Manajemen Data Geospasial				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Manajemen Data Geospasial	Diskominfo dan PUTR	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo dan PUTR	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik terintegrasi	Diskominfo dan PUTR	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo dan PUTR	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo dan PUTR	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

4 Aplikasi						
	A	Penerapan Aplikasi Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi OSS dan Manajemen Data Geospasial Online	Diskominfo dan PUTR	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo dan PUTR	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi OSS dan Manajemen Data Geospasial Online	Diskominfo dan PUTR	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5 Infrastruktur						
	A	Infrastruktur Pendukung Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo dan PUTR	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo dan PUTR	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo dan PUTR	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6 Keamanan						

	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo dan PUTR	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo dan PUTR	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik	Diskominfo dan PUTR	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Manajemen Data Geospasial Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Manajemen Data Geospasial Online	Diskominfo dan PUTR	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Manajemen Data Geospasial Online	Diskominfo dan PUTR	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Manajemen Data Geospasial Online	Diskominfo dan PUTR	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

## N. Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah

No	Project/Activites	UIC	Baseline	Target		
			2022	2023	2024	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih						
Indikator	Opini BPK terhadap LKPD			WTP	WTP	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah						
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Layanan Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik				
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik				
		- Peningkatan Mutu Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik				

		Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	BKAD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah	Inspektorat dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah	Diskominfo dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah	Diskominfo dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset				

		TIK pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah	BKAD dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah	BKPSDM dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah	BKPSDM dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Manajemen Data Keuangan	Bagian Organisasi dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Daerah				
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah	Diskominfo dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik terintegrasi	BKAD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Bebas Elektronik	BKAD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					

	A	Penerapan Aplikasi Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi OSS dan Manajemen Data Keuangan Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi OSS dan Manajemen Data Keuangan Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Keamanan					



	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Manajemen Data Keuangan Daerah Berbasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Manajemen Data Keuangan Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Manajemen Data Keuangan Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Manajemen Data Keuangan Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

## O. Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi

No	Project/Activites	UIC	Baseline	Target			
			2022	2023	2024		
Sasaran Program/Kegiatan Strategis: Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik							
Indikator	Indeks SPBE			3,10	3,20		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi							
1	Tata Kelola						
	A	Kebijakan Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi					
		-	Penyusunan Kebijakan Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		-	Penyusunan SOP Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		-	Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik					
		-	Peningkatan Mutu Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Infrastruktur SPBE					

		Terintegrasi Bebasis Elektronik				
		- Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebasis Elektronik	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
<b>2</b>	<b>Manajemen</b>					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi	Inspektorat dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Infrastruktur	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		SPBE Terintegrasi				
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi	BKAD dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi	BKPSDM dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi	BKPSDM dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen	Bagian Organisasi dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Perubahan pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi	Diskominfo			
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>3</b>	<b>Layanan</b>					
	A	Penerapan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Berbasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Berbasis Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Infrastruktur SPBE Terintegrasi Berbasis Elektronik terintegrasi	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Berbasis Elektronik	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Berbasis Elektronik				
		- Survey Kepuasan	Diskominfo	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

		Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik				
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi OSS dan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Online	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi OSS dan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah - Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>6</b>	<b>Keamanan</b>					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>7</b>	<b>Audit TIK</b>					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik				

		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Infrastruktur SPBE Terintegrasi Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Terintegrasi Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

**P. Layanan Keamanan SPBE terintegrasi**

No	Project/Activites	UIC	Baseline			Target		
			2022	2023	2024	2023	2024	
Sasaran Program/Kegiatan Strategis: Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik								
Indikator	Indeks SPBE				3,10	3,20		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Keamanan SPBE terintegrasi								
1	Tata Kelola							
A	Kebijakan Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi							
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan



	B	Penyelenggaraan Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Peningkatan Mutu Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi	Inspektorat dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi	BKAD dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi	BKPSDM dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi	BKPSDM dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen - Perubahan pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen - Layanan pada Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Keamanan SPBE Terintegrasi Berbasis Elektronik				
		Pelaksanaan Integrasi Layanan - Keamanan SPBE Terintegrasi Berbasis Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Implementasi Keamanan SPBE Terintegrasi Berbasis Elektronik terintegrasi	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Sosialisasi Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi Berbasis Elektronik	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Keamanan SPBE				

		Terintegrasi Bebasis Elektronik				
		Survey Kepuasan Layanan - Keamanan SPBE Terintegrasi Bebasis Elektronik	Diskominfo	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Keamanan SPBE Terintegrasi Bebasis Elektronik				
		Pelaksanaan Aplikasi OSS dan - Keamanan SPBE Terintegrasi Online	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Pengembangan Sistem - Keamanan SPBE Terintegrasi Bebasis Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Monitoring dan Evaluasi Aplikasi OSS dan - Keamanan SPBE Terintegrasi Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Keamanan SPBE Terintegrasi Bebasis Elektronik				
		Pengembangan Pusat Data Layanan - Keamanan SPBE Terintegrasi Bebasis Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan - Keamanan SPBE Terintegrasi Bebasis Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik				
6	Keamanan					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Keamanan SPBE Terintegrasi Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

		SPBE Terintegrasi Online				
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Keamanan SPBE Terintegrasi Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

**Q. Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa**

No	Project/Activites	UIC	Target			
			Baseline 2022	2023	2024	
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik</b>						
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			3,95	4,00	
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa</b>						
1	<b>Tata Kelola</b>					
	A	Kebijakan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Berbasis Elektronik	Layanan Berbasis Elektronik			
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Berbasis Elektronik	Disdukcapil dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Berbasis Elektronik	Disdukcapil dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Sosialisasi dan dan Bimibingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Berbasis Elektronik	Disdukcapil dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Berbasis Elektronik				

		Peningkatan Mutu Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Berbasis Elektronik	Disdukcapil	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Berbasis Elektronik				
		Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Berbasis Elektronik	Disdukcapil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa	Inspektorat dan Disdukcapil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Kependudukan	Diskominfo dan Disdukcapil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		yang Terintegrasi Sampai ke Desa				
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan - Informasi pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa	Diskominfo dan Disdukcapil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada - Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa	BKAD dan Disdukcapil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada - Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa	BKPSDM dan Disdukcapil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Kependudukan				



		yang Terintegrasi Sampai ke Desa				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa	BKPSDM dan Disdukcapil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa	Bagian Organisasi dan Disdukcapil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa	Diskominfo dan Disdukcapil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		- Implementasi Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik terintegrasi	Disdukcapil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik	Disdukcapil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik	Disdukcapil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi OSS dan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Online	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi OSS dan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Online	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

5 Infrastruktur						
	A	Infrastruktur Pendukung Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6 Keamanan						
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Online	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Online	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Online	Disdukcapil dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

## R. Layanan Pendapatan Asli Daerah

No	Project/Activites	UIC	Baseline		Target		
			2022	2023	2023	2024	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatkan Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik							
Indikator	Kemandirian Fiskal Daerah			3,95	4,00		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Pendapatan Asli Daerah							
1	Tata Kelola						
	A	Kebijakan Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik					
		-	Penyusunan Kebijakan Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		-	Penyusunan SOP Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		-	Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik					
		-	Peningkatan Mutu Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik					
		-	Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

2 Manajemen						
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Pendapatan Asli Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen - Risiko pada Layanan Pendapatan Asli Daerah	Inspektorat dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Pendapatan Asli Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Pendapatan Asli Daerah	Diskominfo dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Pendapatan Asli Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa	Diskominfo dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Pendapatan Asli Daerah				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Pendapatan Asli Daerah	BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Pendapatan Asli Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Pendapatan Asli Daerah	BKPSDM dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Pendapatan Asli Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Pendapatan Asli Daerah	BKPSDM dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Pendapatan Asli Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Pendapatan Asli Daerah	Bagian Organisasi dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Pendapatan Asli Daerah				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Pendapatan Asli Daerah	Diskominfo dan BKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

<b>3 Layanan</b>						
	A	Penerapan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik terintegrasi	BKAD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
<b>4 Aplikasi</b>						
	A	Penerapan Aplikasi Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi OSS dan Pendapatan Asli Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi OSS dan Pendapatan Asli Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
<b>5 Infrastruktur</b>						
	A	Infrastruktur Pendukung				



		Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>6</b>	<b>Keamanan</b>					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Kependudukan yang Terintegrasi Sampai ke Desa Bebas Elektronik	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk	BKAD dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik				
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Pendapatan Asli Daerah Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Pendapatan Asli Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Pendapatan Asli Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Keamanan Pendapatan Asli Daerah Online	BKAD dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

**S. Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)**

No	Project/Activites	UIC	Baseline			Target		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sasaran Program/Kegiatan Strategis: Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik								
Indikator	Indeks SPBE				3,10	3,20		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON: Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)								
1	Tata Kelola							
	A	Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)						
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)Be basis Elektronik	Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		- Penyusunan SOP Layanan Administrasi	Diskominfo dan Tim Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik	SPBE			
		Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)Be basis Elektronik	Diskominfo dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik				
		Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)				

		Berbasis Elektronik				
		- Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Berbasis Elektronik	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)	Inspektorat dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)				
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan - Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)	BKAD dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)	BKPSDM dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)	BKPSDM dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang				

		Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)	Bagian Organisasi dan Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)	Diskominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)Bebasis Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Administrasi	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)Be basis Elektronik				
		- Implementasi Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)Be basis Elektronik terintegrasi	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan)Be basis Elektronik	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebasis Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi Bebasis Elektronik	Diskominfo	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Adm Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebasis Elektronik				



		- Pelaksanaan Aplikasi OSS dan Keamanan SPBE Terintegrasi Online	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi OSS dan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Infrastruktur					
	A	Infrastruktur Pendukung Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Keamanan					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

		Pelaksanaan Audit Keamanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Administrasi Pemerintahan) Online	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
--	--	---	------------	------------	------------	------------

**T. Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)**

No	Project/Activites	UIC	Baseline	Target		
			2022	2023	2024	
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>			<b>Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik</b>			
Indikator	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)			3,10	3,20	
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN CIREBON:</b>			<b>Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)</b>			
1	<b>Tata Kelola</b>					
	A	Kebijakan Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik				
		Penyusunan Kebijakan Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DMPTPSP dan Tim Koordinasi SPBE	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan
		Penyusunan SOP Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DMPTPSP dan Tim Koordinasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Sosialisasi dan dan Bimbingan Teknis Kebijakan dan SOP Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DMPTPSP dan Tim Koordinasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Penyelenggaraan Layanan Publik				

		yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Berbasis Elektronik				
		- Peningkatan Mutu Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Berbasis Elektronik	DPMPTSP	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	C	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Berbasis Elektronik				
		- Pemantauan dan Evaluasi Berkala Penyelenggaraan Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Berbasis Elektronik	DPMPTSP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Manajemen					
	A	Penerapan Manajemen Risiko pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)				
		- Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)	Inspektorat dan DMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)				

		<p>Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan</p> <p>- Informasi pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)</p>	Diskominfo dan DMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	B	Penerapan Manajemen Data pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)				
		<p>Pedoman dan Dokumen Manajemen Keamanan</p> <p>- Informasi pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)</p>	Diskominfo dan DMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	C	Penerapan Manajemen Aset TIK pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)				
		<p>Pedoman dan Dokumen Manajemen Aset TIK pada</p> <p>- Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)</p>	BKAD dan DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	D	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)				
		<p>Pedoman dan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia pada</p> <p>- Layanan Publik</p>	BKPSDM dan DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)				
	E	Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Pengetahuan pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)	BKPSDM dan DMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	F	Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Perubahan pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)	Bagian Organisasi dan DPMPSTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	G	Penerapan Manajemen Layanan pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)				
		Pedoman dan Dokumen Manajemen Layanan pada Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik)	Diskominfo dan DMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Layanan					
	A	Penerapan Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps				

		Layanan Publik) Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Implementasi Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik terintegrasi	DPMPTSP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Sosialisasi Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DPMPTSP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Survey Penggunaan Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik				
		- Survey Kepuasan Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DPMPTSP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Aplikasi					
	A	Penerapan Aplikasi Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Aplikasi OSS dan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Online	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket



		- Pengembangan Sistem Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Online	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
<b>5</b>	<b>Infrastruktur</b>					
	A	Infrastruktur Pendukung Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik				
		- Pengembangan Pusat Data Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>6</b>	<b>Keamanan</b>					
	A	Penerapan Keamanan Informasi untuk Publik yang				

		Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik				
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Infrastruktur untuk Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Aplikasi untuk Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Penerapan Keamanan Informasi pada Data dan Informasi untuk Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Audit TIK					
	A	Penyelenggaraan Audit Layanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Bebas Elektronik				
		- Pelaksanaan Audit Aplikasi Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Online	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		- Pelaksanaan Audit Infrastruktur Publik yang	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

		Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Online				
		Pelaksanaan Audit Keamanan Publik yang Terintegrasi (SuperApps Layanan Publik) Online	DPMPTSP dan Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon disusun bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon berpedoman pada Peta Reencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon, RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, Manajemen SPBE, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur, keamanan informasi SPBE, audit TIK SPBE dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Cirebon sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Cirebon, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis. Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Cirebon meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Cirebon meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia.

Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk roadmap yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Walaupun dokumen ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga sebagai indikator pencapaian penilaian indeks SPBE, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Cirebon dalam berjalan secara efektif, efisien, transparan dan terintegrasi. Serta keberhasilan yang dapat dicapai dari peta rencana SPBE adalah peran seluruh stakeholder dan komitmen pimpinan daerah sebagai pemangku kebijakan.